

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Praktik Dinasti Politik

Maluku Utara, semenjak disahkan sebagai Provinsi pada 1999 menyisakan banyak persoalan baru akibat ketidak stabil pemerintahannya. Dalam kontestasi Pilkada Maluku Utara memiliki suhu politik yang tinggi. Terlepas dari persoalan konflik Pilkada, fenomena yang terjadi pasca pemekaran Maluku Utara sebagai dampak reformasi adalah menguat nya praktik dinasti politik merujuk pada aktor yang telah berkompetisi pada Pilkada 2013 dan 2018, yakni Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus. Di mana keduanya memiliki kecenderungan yang sama dalam praktik dinasti politik.

Yakni, dengan terlibatnya keluarga dan senak saudara dalam pengisian jabatan strategis sebagai Anggota DPRD, Bupati/Walikota, dan Gubernur. Sehingga, politik Maluku Utara terkesan di kendalikan oleh sekelompok orang, sehingga menutup ruang publik untuk berpartisipasi dalam kontestasi pesta demokrasi di aras lokal. Hal itu sebagaimana dalam persentase hasil analisis hubungan keluarga dan jabatan dinasti politik Ahmad Hidayat Mus dan Abdul Gani Kasuba di Provinsi Maluku Utara berikut ini:

Tabel 1. Praktik Dinasti Politik: Hubungan Keluarga dan Jabatan Politik

Keluarga	Nama/Hubungan Keluarga	Jabatan
Kasuba	Abdul Gani Kasuba	Anggota DPDRI periode 2004-2007, Wakil Gubernur tahun 2009-2014 dan

		Gubernur dua periode 2014-2024
	Muhammad Kasuba/adik Abdul Gani Kasuba	Anggota DPRD Maluku periode 1999-2001, Anggota DPRD Maluku Utara dua periode 2001-2005, Bupati Halmahera Selatan dua periode 2005-2010
	Bahrain Kasuba/keponakan Abdul Gani Kasuba	Ketua DPRD periode 2009-20014, Anggota DPRD Provinsi periode 2014-2015 dan Bupati Halmahera Selatan periode 2016-2021
Mus	Ahmad Hidayat Mus	Ketua DPRD periode 2004-2005 dan Bupati Kepulauan Sula dua periode 2005-2015
	Aliong Mus/adik Ahmad Hidayat Mus	Bupati DOB Kepulauan Taliabu sejak 2016-2021
	Zainal Mus/ adik Ahmad Hidayat Mus	Ketua DPRD Sula periode 2009-2014 dan Bupati Banggai Kepulauan Periode 2017-2022),
	Alien Mus/ adik Ahmad Hidayat Mus	Ketua DPRD Malut periode 2014-2019 dan Anggota DPDRI 2019-2024

Sumber: Diolah dari berbagai berita media online bereputasi

Dengan begitu, praktik dinasti politik baik dari pihak Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus menunjukkan betapa sangat sistematis dan terkonsolidasi dengan baik, sehingga perjalanan karier–pengisian jabatan strategis terkesan berjalan tanpa hambatan. Dengan demikian, menunjukkan sebuah fakta bahwa praktik dinasti politik telah menguat bahkan tumbuh subur semenjak reformasi dan rentan terjadi di wilayah daerah otonomi baru, sebagaimana yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Praktik dinasti politik mengarah pada pemberian hak istimewa kepada keluarga dalam urusan pelayanan, kebijakan, dan pengisian jabatan publik (baik pemilihan kepala daerah maupun legislatif). Dinasti politik dapat terjadi dalam berbagai lingkungan, tidak hanya soal kedekatan keluarga melainkan juga faktor kedekatan pribadi, politik, dan hubungan sosial lainnya yang mendukung terjadinya relasi

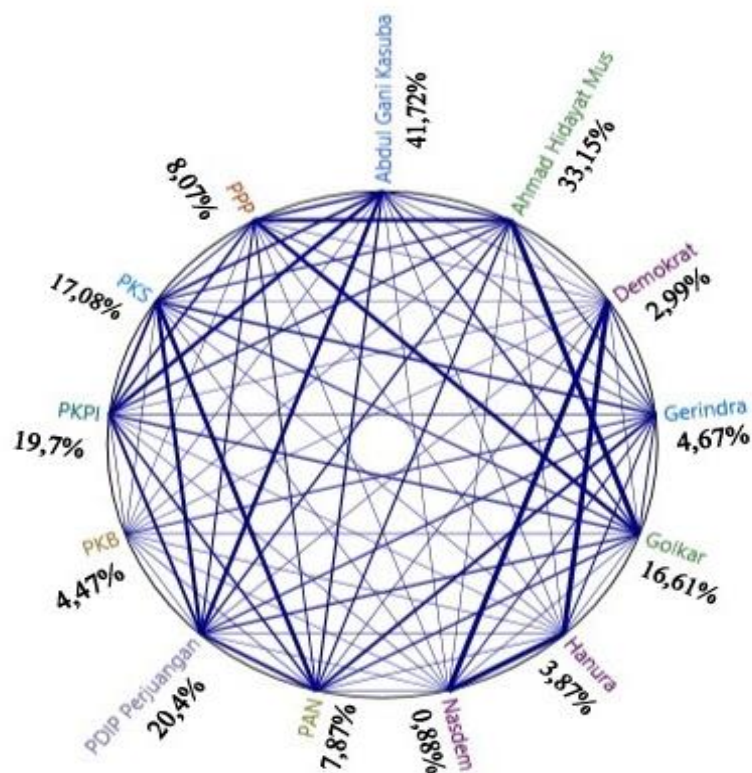
familisme. Patron menjadi legitimasi yang kuat atas relasi familisme karena klien selalu berdampingan patron. Dengan demikian relasi dinasti politik bisa terjadi di mana pun dan dengan siapa pun (Azahra, 2019:115-116). Kepercayaan dan solidaritas merupakan hal yang diprioritaskan untuk pembentukan keluarga politik, sebab hal itu sangat menentukan eksistensinya dalam lingkaran kekuasaan. Pada prinsipnya dinasti politik dalam praktik demokrasi lokal di dasarkan pada pesonalisme, klientalisme dan tribalisme (Fahrurrozi, 2017). Praktik familisme melalui dinasti politik telah tumbuh–menguat di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu terjadi bukan hanya persoalan adanya orang kuat yang berkuasa di daerah, namun juga karena minimnya kontrol atas kekuasaan dan rendahnya kesadaran atau kurangnya pemahaman masyarakat tentang dunia politik (Fikri & Adytyas, 2018:173).

5.2 Relasi Dinasti Politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus Dengan Partai Politik

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah sistem demokrasi, partai politik menjadi jembatan untuk menegosiasikan kepentingan publik, menjadi penghubung antara masyarakat dengan negara. Partai politik memiliki peran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (Thomas Meyer, 2012:7). Partai politik juga menjadi jembatan bagi calon kepala daerah untuk memenangkan kontestasi Pilkada. Untuk itu, relasi calon kepala daerah dengan partai politik menentukan dukungan, basis masa partai, dalam Pilkada. Di mana relasi tersebut menjadi sebuah relasi untuk kepentingan jangka panjang pada

momentum pesta demokrasi. Hal itu sebagaimana relasi dinasti politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus dalam gambar berikut ini:

Gambar 1. Relasi Dinasti Politik Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus dengan Partai Politik dengan Partai Politik
Items clustered by coding similarity



Sumber: Diolah menggunakan Nvivo plus 12 dari berbagai media

Berdasarkan analisis similarity Nvivo di atas terlihat bahwa relasi dinasti politik Abdul Gani Kasuba, memiliki relasi dengan partai PKS yang lebih dominan dengan presentasi 17,08%, disusul dengan beberapa partai PKB , PAN, Gerindra, Demokrat, Hanura, PPP, dan sebagian kecil partai Golkar. Juga memiliki relasi dengan PDI-Perjuangan, PKPI yang begitu erat. Sedangkan dinasti politik Ahmad Hidayat Mus, memiliki relasi yang sangat erat dengan Partai

Golkar mencapai 16,61%, kemudian dengan partai PPP, Demokrat, Gerindra, PAN, sebagian kecil PDI-Perjuangan, dan PKS.

5.3 Jabatan Dinasti Politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus

Dalam Partai Politik

Dominasi elite, dengan mengontrol partai politik, menyebabkan terjadinya penyempitan ruang partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif baik dalam pengisian jabatan maupun dalam pembuatan kebijakan. Jika partai politik dikendalikan oleh kelompok pemodal yang sangat sarat dengan praktik oligarki, maka akan berdampak terhadap partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Di banyak kasus, menunjukkan bahwa kemacetan demokrasi disebabkan karena tidak stabilnya partai politik. Dengan adanya kontrol atas partai politik inilah merupakan pintu masuk terjadinya praktik dinasti politik. Hal itu juga sangat dipengaruhi oleh pragmatisme Partai Politik. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana praktik dinasti politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus. Yaitu, melakukan kontrol atas partai politik dengan mengisi jabatan-jabatan strategis, baik di tingkat daerah maupun sampai di tingkat nasional diantaranya se bagai berikut:

Tabel 2. Jabatan Dinasti Politik Maluku Utara

Keluarga	Nama/Hubungan Keluarga	Partai Pengusung Tahun 2019	Jabatan Dalam Partai
Kasuba	Abdul Gani Kasuba	PDIP, PKPI	Ketua PKS, Ketua Badan Pembina Umat PKS Provinsi Maluku Utara
	Muhammad Kasuba/adik Abdul Gani Kasuba	PKS, PAN, Gerindra	Ketua Bidang Wilayah Dakwah Indonesia Timur DPP PKS
	Bahrain	PKS, PKPI	Ketua DPD PKS, Ketua

	Kasuba/keponakan Abdul Gani Kasuba		DPK PKPI Halmahera Selatan
Mus	Ahmad Hidayat Mus	Partai Golkar, PPP	Korbid Pemenang Pemilu Indonesia II Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan- Sulawesi, dan Papua Partai Golkar
	Aliong Mus/adik Ahmad Hidayat Mus	Partai Golkar	Ketua DPD Golkar Kab. Pulau Taliabu
	Zainal Mus/ adik Ahmad Hidayat Mus	Hanura, PBB, Demokrat, PKS	Kader Partai Golkar
	Alien Mus/ adik Ahmad Hidayat Mus	Partai Golkar	Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara

Sumber: Diolah dari berbagai berita media online bereputasi

Berdasarkan hasil presentasi tabel 1. di atas, terlihat bahwa partai politik adalah pintu masuk terjadinya praktik dinasti politik di Maluku Utara. Abdul Gani Kasuba melakukan praktik dinasti politik dengan mengendalikan Partai PKS, menjabat sebagai Ketua Partai sekaligus sebagai Ketua Badan Pembina Umat Provinsi Maluku Utara. Muhamad Kasuba selaku adik dari Abdul Gani Kasuba merupakan Ketua Bidang Wilayah Dakwah Indonesia Timur DPP PKS. Dan Bahrain Kasuba selaku keponakan Abdul Gani Kasuba pernah menjabat sebagai Ketua DPD PKS, dan sebagai Ketua DPK PKPI Halmahera Selatan. Selanjutnya, praktik dinasti politik yang dilakukan Ahmad Hidayat Mus dengan melakukan kontrol kekuasaan melalui partai Golkar di mana Hidayat Mus sebagai Korbid Pemenang Pemilu Indonesia II Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan-Sulawesi, dan Papua di masa kepengurusan Setya Novanto. Keterlibatan keluarga Ahmad Hidayat dalam partai Golkar diantaranya: Aliong Mus adik dari Ahmad Hidayat Mus menjabat sebagai Ketua DPD Kab. Pulau Taliabu, Zainal Mus/ adik Ahmad

Hidayat Mus sebagai kader partai, dan Alien Mus/ adik Ahmad Hidayat Mus Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara.

Dengan demikian, adanya kontrol atas partai politik menyebabkan terhimpitnya ruang demokrasi. Hal itu tentu sangat mempengaruhi partisipasi publik dalam kontestasi Pilkada. Sehingga kontestasi Pilkada Provinsi Maluku Utara terkesan dikendalikan oleh dinasti politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus.

5.4 Dukungan Partai Politik Kepada Dinasti Politik Adbdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa relasi dinasti politik dengan partai politik sangat mempengaruhi kedudukan dari dinasti politik dalam suksesi Pilkada, sebab relasi tersebut menjadi legitimasi ataupun penentu dukungan Partai Politik terhadap praktik dinasti politik.

Dukungan Partai Politik kepada dinasti politik pada Pilgub Tahun 2013, Abdul Gani Kasuba-Muhammad Natsir Taib, Partai PKS menjadi pendukung utama dan juga mendapatkan dukungan partai Republikan, Partai Demokrasi Kebangsaan, PKB, PKPI, dan Partai Peduli Rakyat Nasional. Pada periode kedua, Pilgub 2018, Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali diusung oleh PDI-P dan PKPI. Dengan demikian, PKPI menjadi partai yang konsisten memberikan dukungan kepada Abdul Gani Kasuba. Sedangkan PDIP hanya memberikan dukungan pada periode kedua menggantikan dukungan partai PKS karena telah memberikan rekomendasi kepada Muhammad Kasuba selaku adik dari Abdul Gani Kasuba berpasangan Majid Husen dalam Pilgub tersebut yang diusung oleh PKS, Partai

Gerindra, dan PAN. Selanjutnya pada Keluarga Politik Ahmad Hidayat Mus: Partai Golkar dan PPP menjadi partai yang setia memberikan dukungan. Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa Pada Pilgub 2013 diusung Partai Golkar, Hanura, PPP, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Karya Peduli Bangsa. Periode kedua pada Pilgub 2018, Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar diusung oleh Partai Golkar dan PPP (www.kompas.com, 2018).

5.5 Modalitas Dinasti Politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus

Dalam kontestasi Pilkada, modalitas berupa modal ekonomi, politik sosial dan modal kultural merupakan modal utama yang mestinya dimiliki para kandidat. Semakin besar modalitas yang dimiliki oleh pasangan calon, memiliki lebih dari satu modal, sangat menentukan peluang untuk terpilih sebagai kepala daerah (Baharuddin & Purwaningsih, 2015:211-212). Terlepas dari modalitas yang ada, modal sosial berupa kepercayaan terhadap pasangan calon juga sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pemilihan kepala daerah, sebab modal sosial menjadi tolak ukur kelayakan pasangan calon untuk dipilih oleh masyarakat. Jika, pasangan calon memiliki legitimasi modal sosial yang kuat tentu tidak hanya dekat dengan masyarakat, namun juga akan diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin (Ratnia Solihah, 2019:30-31). Kemampuan mengelola modal politik untuk membangun kekuatan personal dengan menghubungkan dengan modal sosial, yakni memanfaatkan jaringan sosial, atas ikatan etnis dan identitas agama adalah prasyarat utama untuk mendapatkan dukungan dari partai politik serta dukungan dari para pemilih demi memperoleh kemenangan Pilkada (Ika Kartika, et al., 2018:148). Dengan begitu, secara sederhana dapat dikatakan

bahwa modalitas memiliki peran yang sangat penting untuk memenangkan kontestasi pilkada. Modalitas dalam pembahasan ini merujuk pada dinasti politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus.

Modal Ekonomi

Modal ekonomi dibutuhkan untuk kelancaran kerja-kerja dalam memenangkan kompetisi Pilkada. Modal ekonomi dalam Pilkada berkaitan dengan kekayaan calon kepala daerah berupa kekayaan pribadi dan sumbangan kampanye. Sebagaimana terlihat dalam kontestasi Pilkada 2018, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 8 Januari 2018, Abdul Gani Kasuba menduduki posisi keempat dari pasangan calon lainnya dengan kekayaan sebanyak Rp 6.545.876.657, diantaranya harta tanah dan bangunan Rp5.380.000.000, alat transportasi dan mesin Rp100.000.000, harta bergerak lainnya Rp360.000.000, serta kas Rp1.035.876.657, dan hutang senilai Rp330.000.000. Ali Yasin sebagai wakil Abdul Gani Kasuba dengan jumlah kekayaan 22.233.400.1 terbanyak kedua setelah Ahmad Hidayat Mus (www.kieraha.com, 2018).

Sebagai aktor yang memiliki latar belakang pengusaha, menyebabkan Ahmad Hidayat Mus secara modal ekonomi, memiliki legitimasi yang kuat dalam Pilkada. Pada periode 2013-2018 kekayaan Ahmad Hidayat Mus mencapai Rp 35.212.963.348 dan Rp 110.000 dollar AS. Kekayaan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 21.500.227.500 atau mencapai 21 miliar lebih. Pada periode 2018 Hidayat Mus memiliki kekayaan yang berada dalam kategori urutan pertama dengan kekayaan sebesar 52.241.112.194 atau mencapai lebih Rp 52

miliar. Di mana modalitas Ahmad Hidayat Mus lebih besar dari kandidat yang lain. Terdiri dari harta tanah dan bangunan Rp 33.855.304.500, harta alat transportasi dan mesin Rp7.950.000.000, harta bergerak lainnya Rp1.570.000.000, dan kas setara kas besar dengan besaran Rp8.236.483.907 (www.tempo.co, 2018)

Dengan demikian, Secara modal ekonomi Abdul Gani Kasuba tergolong tidak terlalu mapan ketika dibandingkan dengan Ahmad Hidayat Mus. Untuk mengimbangi dan memenangkan kontestasi Pilkada Abdul Gani kerap memilih aktor yang memiliki modal ekonomi yang mapan sebagai wakilnya.

Modal Politik

Abdul Gani Kasuba memiliki legitimasi yang sangat kuat semenjak menjadi wakil gubernur dan melanjutkan sebagai gubernur 2 periode. Disisi yang lain Abdul Gani Kasuba Juga memiliki komunikasi politik dan strategi politik yang baik. Hal itu dibuktikan ketika mencalonkan diri sebagai gubernur, bukan kader partai, mendapatkan rekomendasi PDI-P dalam pencalonan Pilgub 2018. Modal politik dinasti politik Abdul Gani Kasuba berawal ketika Muhammad Kasuba yang merupakan adik kandung Abdul Gani Kasuba memegang jabatan Anggota DPRD Maluku periode 1999-2001, setelah Maluku Utara disahkan sebagai Provinsi pada tahun 1999 Muhammad Kasuba terpilih sebagai Anggota DPRD Maluku Utara dua periode 2001-2005, dan menjadi Bupati Halmahera Selatan dua periode 2005-2010.

Pada Tahun 2004 Abdul Gani Kasuba memulai karier sebagai Anggota DPDRI periode 2004-2007, Wakil Gubernur tahun 2009-2014 dan Gubernur dua

periode 2014-2024, dengan jenjang karier yang begitu cepat, menjadikan Abdul Gani Kasuba sebagai simbol dari keluarga Kasuba. Dan Bahrain Kasuba keponakan dari Abdul Gani Kasuba pun mengawali karier sebagai Ketua DPRD periode 2009-2014, Anggota DPRD Provinsi periode 2014-2015 dan Bupati Halmahera Selatan periode 2016-2021. Berakhirnya jabatan Muhammad Kasuba, digantikan Bahrain Kasuba sebagai Bupati di Halmahera Selatan menunjukkan pengaruh keluarga Kasuba sangat kuat berada di wilayah tersebut. Selanjutnya, modal politik dinasti Mus diawali dengan terpilihnya Ahmad Hidayat Mus (AHM) sebagai Ketua DPRD periode 2004-2015 dan Bupati Kepulauan Sula dua periode 2005-2015.

Pada tahun 2016 AHM menjadi tokoh pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu yang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula. Hasil pemekaran Pulau Taliabu itu, mejadi awal karier Aliong Mus, merupakan adik kandung Ahmad Hidayat Mus, meraih kemenangan sebagai Bupati atas Zainal Mus yang juga saudaranya sendiri. Zainal Mus menjabat sebagai Ketua DPRD Sula periode 2009-2014 dan Bupati Banggai Kepulauan Periode 2017-2022. Dan Alien Mus adik kandung Ahmad Hidayat Mus menjabat sebagai Ketua DPRD Malut periode 2014-2019 dan Anggota DPD-RI 2019-2024. Dinasti politik Mus sangat kuat terjadi di Wilayah Kepulaun Sula dan sekitarnya.

Modal Sosial

Modal sosial menjadi syarat kelayakan untuk mendapatkan dukungan pemilih dalam kontestasi Pilkada. Jika kandidat kepala daerah memiliki modal sosial yang mapan akan memperoleh kemenangan, sebab tidak hanya dikenal oleh

masyarakat melainkan juga dianggap layak untuk menjadi pemimpin kepala daerah. Secara modal sosial, Abdul Gani Kasuba merupakan salah satu tokoh yang paling dikenal. Dimulai ketika ia terlibat aktif, berkunjung di pengungsian untuk memberikan ceramah ataupun bantuan, ketika konflik sara berkecamuk di wilayah Maluku Utara. Sebagai alumnus Universitas Madinah, Abdul Gani Kasuba dikenal sebagai seorang Dai, bahkan kerap dijuluki sebagai “Dai seribu pulau” hal itulah yang membuat dirinya begitu akrab dan dikenal luas masyarakat Maluku Utara yang penduduknya adalah mayoritas Islam. Ahmad Hidayat Mus memiliki legitimasi basis massa Kesultanan Ternate karena pernah dinobatkan sebagai bagian dari pihak kerajaan. Namun, dengan keberagaman budaya masyarakat Maluku Utara membikin Ahmad Hidayat Mus tidak begitu dikenal, sehingga dukungan pemilih pun lebih cenderung diberikan kepada Abdul Gani Kasuba. Sebagaimana dalam presentasi perolehan suara dalam Pilkada Maluku Utara Tahun 2013 dan Tahun 2018 berikut ini:

Tabel 3. Perolehan Suara Dalam Pilkada Maluku Utara Tahun 2013 Dan Tahun 2018

Pemilihan Gubernur Tahun 2013	Suara	%	Suara Putaran Kedua
Adul Gani Kasuba-Muhammad Natsir Thaib	123.689	21,54%	262.983
Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa	163.684	28,50%	258.747
Pemilihan Gubernur Tahun 2018			
Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali	176.669	31,79%	
Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar	175.749	31,62%	

Dari tabel 3. di atas, menunjukkan bahwa dukungan pemilih cenderung diberikan kepada Abdul Gani Kasuba, sehingga mengantarkannya untuk menduduki kursi kekuasaan Gubernur dua periode dan Ahmad Hidayat Mus harus menerima kekalahan untuk kedua kalinya pada Pilkada Provinsi Maluku Utara.

Modal Kultural

Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Maluku Utara sangat beragam, memiliki sekitar 28 suku dan bahasa tersebar di 10 Kabupaten/Kota diantaranya: Suku Madole, Suku Pagu, Suku Ternate, Suku Makian Barat, Suku Kao, Suku Tidore, Suku Buli, Suku Patani, Suku Maba, Suku Sawai, Suku Weda, Suku Gane, Suku Makian Timur, Suku Kayoa, Suku Bacan, Suku Sula, Suku Ange, Suku Siboyo, Suku Kadai, Suku Galela, Suku Tobelo, Suku Loloda, Suku Tobaru, Suku Sahu, Suku Arab, dan Eropa. Meskipun demikian, dalam kontestasi pilkada Suku Togale (Tobelo-Galela) dan Makayoa (Makian-Kayoa) adalah suku mayoritas yang memiliki peran yang sangat menentukan kemenangan dalam kontestasi pilkada Maluku Utara.

Untuk itu, Secara modal kultural Abdul Gani Kasuba, lelaki kelahiran Tobelo, memiliki identitas kebudayaan sebagai masyarakat suku Togale (Tobelo-Galela) yang juga merupakan salah satu suku mayoritas di Maluku Utara. Hal itulah yang menjadi legitimasi yang kuat kemenangannya sebagai Gubernur. Sedangkan Ahmad Hidayat Mus tidak begitu berpengaruh karena tidak dilahirkan dari suku mayoritas yakni berasal dari Kabupaten Pulau Taliabu. Untuk mengimbangi Abdul Gani Kasuba, Ahmad Hidayat Mus memilih Rivai Umar, merupakan tokoh dalam kalangan masyarakat Makayoa, sebagai wakil dalam kontestasi Pilkada.